

Yusril Sebut MK Tak Bisa Ciptakan Norma Baru terhadap Undang-undang

JAKARTA (IM) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang (UU) dengan UU Dasar 1945. Menurutnya, seharusnya MK tidak bisa serta-merta membuat tafsiran dari pasal atau UU yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Hal itu diungkapkan Yusril dalam diskusi daring bertajuk "Putusan MK Verifikasi Parpol: Menepuk Air di Daur Ulang Terperic Muka Sendiri", Selasa (1/6).

"Kami yang dulu terlibat dalam proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pikiran itu sederhana, ada yang mengatakan bahwa MK itu menguji UU dan menyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu, selesai diputuskan begitu, selesai tugas MK," kata Yusril.

Yusril mengatakan, dalam penyusunan UU tentang MK para perumus akhirnya memberikan perluasan kewenangan pada MK. Namun, MK mengembangkan suatu yurisdiksi, memperluas kewenangannya dengan memperbolehkan. "Kalau MK itu kemudian menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, kemudian dia menafsirkan sendiri nah putusan MK itu kan menjadi semacam norma baru," ujarnya.

"Lebih celaka lagi dulu jamannya Pak Mahfud MD, MK menyatakan satu pasal bertentangan lalu dia bikin pengaturannya seperti ini," kata Yusril.

KPK Tak Akan Publikasikan Nama Pegawai yang Tak Lolos TWK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons adanya pemberitaan mengenai nama-nama pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Adapun tes tersebut merupakan bagian alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara (ASN).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap pegawai maka nama-nama yang memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) tidak akan pernah dipublikasikan.

"Sebagaimana keputusan rapat yang dihadiri seluruh pimpinan, dewas, dan seluruh pejabat struktural eselon I dan II di lingkungan KPK,

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menilai bisa saja nantinya presiden dan DPR keberatan dengan putusan MK. Pasalnya MK, kata Yusril memiliki peran, dia secara teori hukum tata negara dia peranannya itu adalah melakukan kewenangan legislasi sebatas negative legislation.

"Dia (MK) hanya meniadakan, bukan dia menciptakan (norma) yang baru. Karena menciptakan yang baru itu adalah kewenangan DPR dan presiden," ucap Yusril.

Sebelumnya Yusril menilai, putusan MK mengenai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak logis. Adapun pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu ataupun partai baru.

"Kalau kita mulai buka logika Aristoteles sampai logika kalkulus yang paling muktahir kita verifikasi untuk menguji logik atau tidak. Putusan MK itu tidak logis," ujarnya.

Yusril mengatakan, putusan MK terkait Pasal 173 beberapa waktu lalu membagi partai politik menjadi tiga kategori yakni partai yang sudah melakukan verifikasi, pernah ikut pemilu dan lolos ambang batas parlemen.

Kemudian, partai politik yang sudah melakukan verifikasi, pernah ikut pemilu tetapi tidak lolos ambang batas parlemen. Sedangkan kategori terakhir adalah partai politik baru yang belum pernah melakukan verifikasi dan belum pernah ikut pemilu. ● mar

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RISMA KUNJUNGI BEKAS PENJARA BUNG KARNO

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini memberikan bendera Merah Putih kepada juru pemelihara saat mengunjungi cagar budaya Lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6). Kunjungan tersebut sebagai napak tilas merasakan semangat Bung Karno ketika memerdekakan Republik Indonesia sekaligus rangkaian peringatan bulan Bung Karno tiap bulan Juni.

KSAU Ungkap Setahun Terakhir, Aktivitas Pesawat Militer Asing di Ruang Udara RI Tinggi

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah mengupayakan terbentuknya Badan Pengelola Ruang Udara Nasional.

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo ungkap bahwa dalam setahun terakhir aktivitas penerbangan pesawat militer asing di ruang udara nasional cukup tinggi. "Dalam setahun terakhir ini aktivitas penerbangan militer asing mengalami peningkatan yang cukup signifikan,

terutama dikaitkan eskalasi sengketa klaim sepihak di Laut Tiongkok Selatan," ujar Fadjar dalam Seminar Nasional Sintergitas Pengelolaan Ruang Udara Nasional, Rabu (2/6).

Fadjar menyebut, salah satu lokasi yang pernah dilalui pesawat militer asing adalah di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu, pihaknya

juga mencatat hingga kini terdapat ratusan air street atau jalur udara di wilayah timur Indonesia yang sepenuhnya belum dikelola pemerintah.

Menurutnya, ratusan jalur udara tersebut masih aktif dilalui penerbangan perintis. Hanya saja, aktivitas tersebut sejauh ini belum bisa diawasi secara komprehensif. Sebaliknya, belum adanya pengelolaan terhadap ratusan jalur tersebut berpotensi dapat digunakan untuk kegiatan ilegal. "Penyelundupan narkoba, miras, dan bahkan manusia," kata Fadjar.

Selain itu, Fadjar juga mengungkapkan bahwa dua tahun

masih banyak terjadi pelanggaran di wilayah ruang udara nasional. Baik yang dilakukan maskapai sipil maupun pesawat militer asing. Pada 2018 dan 2019 misalnya, TNI AU pernah melaksanakan intervensi terhadap penerbangan sipil yang terbukti melintas di wilayah udara bagian barat Indonesia. Hanya saja, penindakan selanjutnya saat itu belum ada payung hukum dan wewenang yang terperinci.

Fadjar juga memastikan bahwa TNI AU saat ini konsern mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ruang udara nasional. "Hal ini adalah salah satu concern yang menjadi fokus utama TNI AU," ujarnya.

Badan Pengelola

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah mengupayakan terbentuknya Badan Pengelola Ruang Udara Nasional. Upaya terbentuknya

badan ini dilakukan melalui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Daya Ruang Udara Nasional yang tengah diperjuangkan masuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2019-2024.

"Kita memperjuangkan masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2019-2024. Artinya, lima tahun ini kalau tidak selesai maka kesempatan untuk dibahas di DPR juga akan tertutup," ujar Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemenhan, Marsma TNI Muhammad Idris di acara yang sama.

Idris menjelaskan, badan ini hanya bersifat koordinatif. Tugasnya antara lain menyusun mengenai kepentingan strategis nasional terkait pengelolaan ruang udara, mengkoordinasikan pembinaan, penataan dan pengendalian ruang udara, meneruskan kebijakan, dan menjalankan tugas lain. ● me

Keluarga Tahanan KPK Diperbolehkan Kunjungan Tatap Muka, Ini Syaratnya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi kesempatan kepada keluarga atau kerabat para tahanan untuk tatap muka langsung.

"Rutan KPK melakukan penyesuaian terkait kunjungan bagi para tahanan dengan kembali melaksanakan kunjungan langsung. Namun demikian untuk kunjungan online juga tetap masih diberlakukan," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (2/6).

Hanya saja kunjungan tersebut akan dibatasi karena diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. "Penerapan budaya New Normal Rutan KPK bagi kunjungan secara langsung dengan proporsi kehadiran fisik dalam jumlah tertentu dengan secara ketat memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan," jelasnya.

Ketentuan itu harus dipatuhi pihak keluarga atau kerabat yang ingin mengunjungi tahanan, di mana pengunjung wajib membawa hasil swab antigen negatif Covid-19 atau tes swab PCR atau tes Genose yang masih berlaku.

Keluarga tahanan yang boleh ketemu langsung dengan tahanan dibatasi maksimal 3 orang dan Penasihat Hukum

maksimal 2 orang dengan ketentuan kehadiran fisik di Rutan KPK tidak bergantian keluar masuk

"Social distancing dengan menjaga jarak ketika antri pendaftaran dan bertemu tahanan. Dan Tahanan beserta keluarga wajib menggunakan masker dan faceshield," ujar Ali.

Untuk waktu berkunjung, bagi Penasihat Hukum diperbolehkan pada Senin s/d Jumat dari pukul 13.00 s/d 15.00 WIB. Sedangkan, keluarga pada Senin s/d Kamis dari pukul 10.00 s/d 12.00 WIB dan Jumat dari pukul 09.00 s/d 12.00 WIB. ● me

Kenang Istri Tercinta, SBY Dendangkan Lagu 'Pusara Cinta'

JAKARTA (IM) - Presiden ke 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyanyikan lagu berjudul "Pusara Cinta". Lagu itu dipersembahkannya untuk untuk mengenang almarhum istrinya, Ani Yudhoyono, yang meninggal dua tahun lalu.

"Hari ini, setelah kami,

keluarga dan sejumlah sahabat berdoa dan berzikir berkaitan hari berpulangnya istri tercinta, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menghadirkan sebuah tembang lawas yang lirik dan nadanya selalu tergiang ketika hampir setiap minggu saya dan keluarga berziarah ke makam istri tercinta." kata SBY dilansir dari akun instagram @aniyudhoyono, Rabu (2/6).

Dilansir dari halaman instagram @aniyudhoyono juga, SBY mengungkapkan rasa kehilangan akibat ditinggal sang istri. Kehidupannya tidak I lagberjalan sama ketika sang almarhum masih hidup.

"Tepat 2 tahun yang lalu, sebagaimana para sahabat ketahui, istri tercinta berpulang ke Rahmatullah. Sejak saat itu, hari-hari saya dan bahkan hidup saya tak pernah sama lagi. Saya dan keluarga sungguh sangat kehilangan dan juga merasakan kesedihan yang dalam," ujarnya.

SBY juga mengaku membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama untuk menerima kepergian sang istri.

"Sebagai seorang yang beriman saya amat tahu untuk tetap tawakal, dan menerima takdir Allah ini. Meskipun, jujur, saya harus akui bahwa saya memerlukan waktu lebih lama lagi untuk melakukan healing process," tulisnya

Kendati demikian, SBY menyadari pentingnya memenuhi aktivitas sehari-hari untuk meredakan kepergian sang istri. Hal ini menurutnya adalah harapan yang sama yang juga almarhum istri mau.

"Saya harus mengisi hidup saya, di samping beribadah dan mencari hikmah, dengan berbagai aktivitas pribadi. Saya harus benar-benar "move on". Saya yakin itu pula yang diinginkan oleh istri tercinta," ujarnya

SBY kemudian mengharap doa-doa terus dilantarkan kepada sang istri. Lagu ini juga diharapkan dapat mengenang kembali sosok Ani Yudhoyono bagi para sahabat sahabatnya.

"Semoga lagu manis ini bisa membuat para sahabat Ani Yudhoyono mengenangnya kembali. Saya mohon doa para sahabat, dan semoga kiranya almarhumah istirahat dengan tenang dan bahagia di sisi Allah SWT." ujarnya. ● han

PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Tbk

LAPORAN KEUANGAN PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Tbk

Alamat:

Jalan Raden Fatah No. 62

Ciledug - Tangerang 15151

Telp: 021 22797778

Website : www.bhaktiagung.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	2020	2019*	2018*
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.122.853.866	369.208.152	117.863.484
Piutang usaha - pihak ketiga	3.041.415.794	-	-
Piutang lain - lain	73.067.311	-	-
Aset real estat	610.133.580.551	583.447.593.498	230.083.691.216
Uang muka kontraktor	99.326.500	8.235.589.500	25.438.322.000
Pajak dibayar dimuka	11.785.623.081	12.463.343.052	4.415.070.408
Total Aset Lancar	626.255.867.103	604.515.734.202	260.054.947.108
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	45.358.090	14.470.523	21.080.297
Total Aset Tidak Lancar	45.358.090	14.470.523	16.021.080.297
TOTAL ASET	626.301.225.193	604.530.204.725	276.076.027.405
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	14.439.399.771	14.449.697.224	19.857.301.750
Utang pajak	4.962.875.715	3.806.248.452	109.717.891
Pendapatan diterima dimuka	15.774.156.772	18.460.956.097	9.464.421.603
Beban akrual	3.711.243.592	-	-
Utang relensi	10.015.693.375	9.137.335.002	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	48.903.369.225	45.854.236.775	29.431.441.244
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman bank	148.314.490.324	127.208.200.000	59.437.600.000
Liabilitas imbal kerja	350.403.216	268.658.037	1.959.092.932
Total Liabilitas Jangka Panjang	148.664.893.540	127.476.858.037	237.431.527.307
Total Liabilitas	197.568.262.765	173.331.094.812	266.862.968.551
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal			
Rp50 per saham pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019			
dan Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2018			
Modal dasar - 15.656.872.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan 16.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018			
Modal ditempatkan dan disetor			
5.591.740.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 5.591.740.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 16.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018			
Tambahan modal disetor	279.587.000.300	279.587.000.000	16.000.000.000
160.227.060.994	160.227.060.364	-	-
Penghasilan komprehensif lain	(36.850.994)	(27.545.178)	(19.137.791)
Defisit	(11.044.247.872)	(8.587.405.273)	(6.767.803.355)
Total Ekuitas	428.732.962.428	431.199.109.913	9.213.058.854
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	626.301.225.193	604.530.204.725	276.076.027.405

Catatan :

* Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan kembali.

** Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporannya tertanggal 25 Mei 2021.

*** Dikarenakan informasi keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan. Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan, tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	2020	2019	
PENJUALAN	13.272.828.632	-	
BEBAN POKOK PENJUALAN	9.085.788.937	-	
LABA BRUTO	4.187.039.695		
BEBAN USAHA			
Beban usaha	6.312.989.077	3.648.363.225	
RUGI USAHA	(2.125.949.382)	(3.648.363.225)	
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan lain-lain	11.719.942	1.849.611.387	
Beban lain-lain	(10.792.443)	(20.850.080)	
Penghasilan Lain-lain - Neto	927.499	1.828.761.307	
RUGI SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	(2.125.021.883)	(1.819.601.918)	
Pajak final	(331.820.716)	-	
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.456.842.599)	(1.819.601.918)	
Beban pajak penghasilan	-	-	
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	(2.456.842.599)	(1.819.601.918)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(9.305.816)	(8.407.387)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(9.305.816)	(8.407.387)	
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(2.466.148.415)	(1.828.009.305)	
RUGI PER SAHAM DASAR	(0,44)	(0,33)	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Defisit	Total Ekuitas
Saldo 1 Januari 2019	16.000.000.000	-	(19.137.791)	(5.003.229.962)	10.977.632.247
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan standar akuntansi baru	-	-	-	(1.764.573.393)	(1.764.573.393)
Saldo 1 Januari 2019 setelah penyesuaian	16.000.000.000		(19.137.791)	(6.767.803.355)	9.213.058.854
Setoran modal	263.587.000.000	167.752.200.000	-	-	431.339.200.000
Biaya emisi	-	(7.525.139.636)	-	-	(7.525.139.636)
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(8.407.387)	(1.819.601.918)	(1.828.009.305)
Saldo 31 Desember 2019	279.587.000.000	160.227.060.364	(27.545.178)	(8.587.405.273)	431.199.109.913
Penambahan modal saham dari pelaksanaan waran	300	630	-	-	930
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(9.305.816)	(2.456.842.599)	(2.466.148.415)
Saldo 31 Desember 2020	279.587.000.300	160.227.060.994	(36.850.994)	(11.044.247.872)	428.732.962.428

Tangerang, 31 Mei 2021
PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Tbk
Direksi